

# BAB I

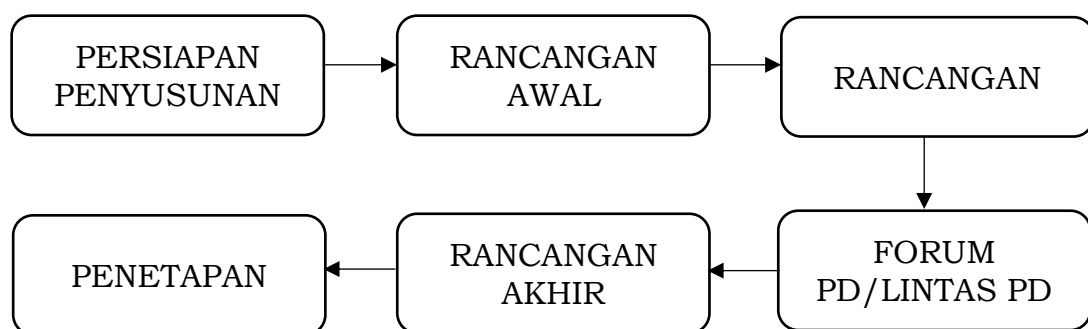
## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan Renja, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan:

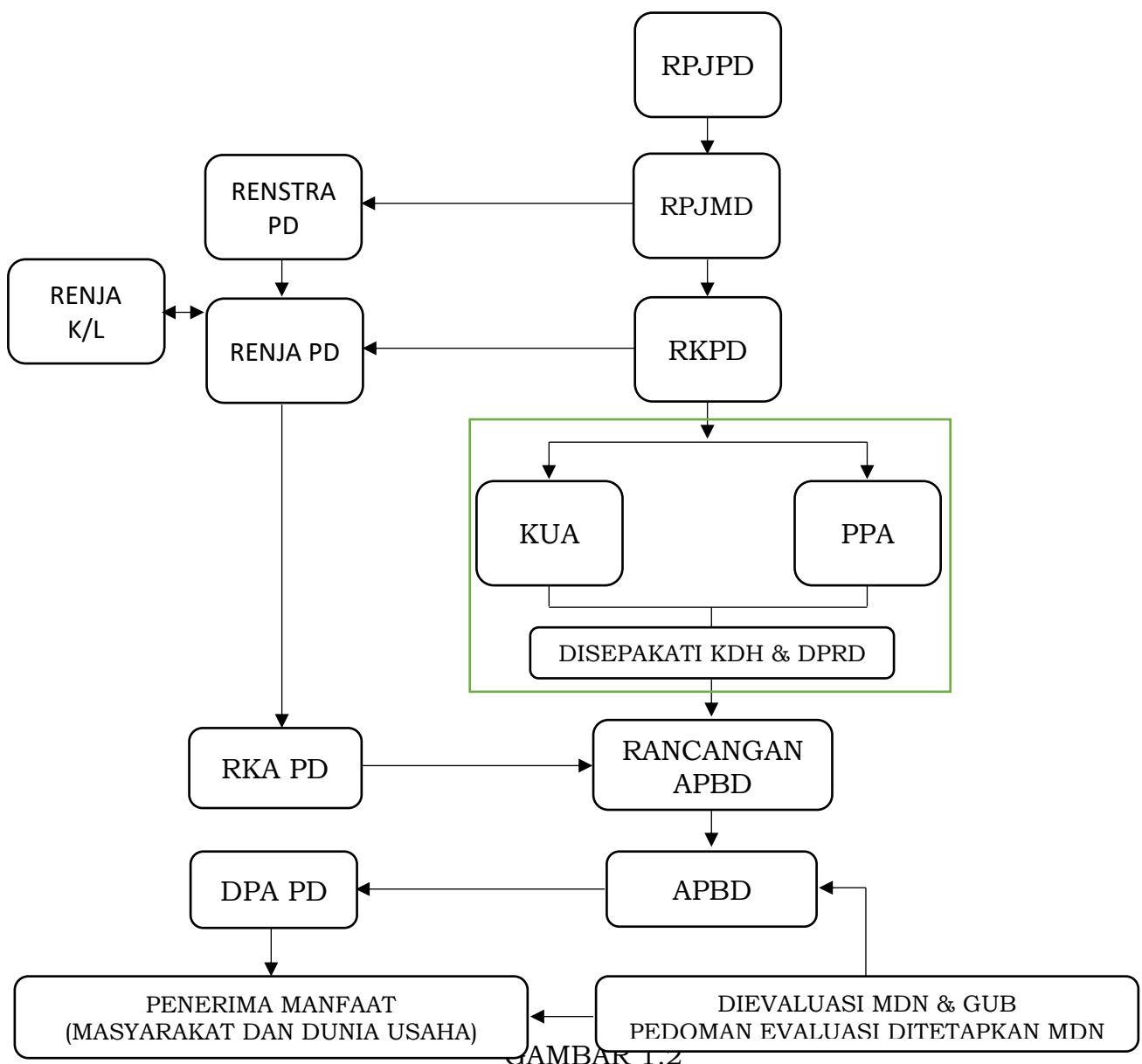
1. Persiapan penyusunan dengan pembentukan tim penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu (2019), dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2020). Berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga mempertimpangkan Renja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi pembina, untuk memastikan bahwa fokus pengawasan Inspektorat Jawa Tengah telah sejalan dengan perencanaan pengawasan nasional.



GAMBAR 1.2

Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD. Seluruh program selama lima tahun memedomani program prioritas dalam RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) ke dalam kegiatan prioritas. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  26. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
  38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
  39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
43. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
52. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam

perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan tujuan :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 pada tahun ke-4 periode Tahun 2022.
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

###### 1.1 LATAR BELAKANG

###### 1.2 LANDASAN HUKUM

###### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

###### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

##### BAB II HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

###### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

###### 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

###### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

###### 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RCPD

###### 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

##### BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

###### 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

###### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

##### BAB V PENUTUP

BAB II  
HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya penguatan peran pengawasan intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan untuk sasaran strategisnya yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP, dengan Indikator Kinerja Kapabilitas APIP level 3 pada elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, serta Struktur dan Tata Kelola;
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP, dengan Indikator Kinerja Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :
  - a) Lingkungan Pengendalian
  - b) Penilaian Risiko
  - c) Kegiatan Pengendalian
  - d) Informasi dan Komunikasi
  - e) Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Anggaran yang dikelola Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 sebesar Rp 30.627.046.000,- dengan realisasi mencapai Rp 29.792.275.993,- atau 97,27%.

Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA	KEBIJAKAN/ TINDAKAN UTK MENGATASI
1	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Perencanaan belum selaras antara Renstra dan Renja dan Renstra Inspektorat belum pernah di reviu;</li> <li>• Dalam pengukuran kinerja belum ada ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjenjang;</li> <li>• Evaluasi kinerja belum sepenuhnya</li> </ul>	Target: 86 Capaian: 83.71 Perlu meningkatkan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan Renstra dan Renja dan menyusun tim Reviu Renstra Inspektorat;</li> <li>• Kinerja Eselon III dan IV sudah disusun Perjanjian Kinerja;</li> <li>• 3. Perlunya Rakor Pengendalian intern secara berkala</li> </ul>



NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA	KEBIJAKAN/ TINDAKAN UTK MENGATASI
		dilaksanakan guna pengendalian capaian dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.		sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada.

Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA
1	Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat		
	Level Kapabilitas APIP	Komitmen dari Para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Target: Level 3 DC (2 elemen) Capaian: Level 3 Penuh <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat lebih mewujudkan peran APIP yang efektif baik dari sisi <i>quality assurance</i> maupun <i>consulting partner</i></li> </ul>
2	Manajemen Resiko		
	Nilai Maturitas SPIP	Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Target: 3,17 Capaian: 3,12 <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat lebih mewujudkan kondisi Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
3	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Target: 87,35 Capaian: 87.11 <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menggambarkan seberapa puas pelanggan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada aspek penguasaan materi pengawasan, aspek penyampaian komunikasi, aspek pelaksanaan standar audit, kode etik, dan aspek manfaat hasil pemeriksaan.</li> </ul>

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05			Pengawasan										
4	05			Inspektorat										
4	05	15		Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat										
4	05	15	001	Audit Kinerja	Jumlah hasil audit yang dihasilkan wilayah I	148	72	36	36	100	72,97	10	10	100
					Jumlah hasil audit yang dihasilkan wilayah II	148	72	36	36	100	72,97	10	10	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Jumlah hasil audit yang dihasilkan wilayah III	148	72	36	36	100	72,97	10	10	100
					Jumlah hasil audit yang dihasilkan	30	6	6	6	100	40	6	6	100
4	05	15	002	Evaluasi Kinerja	Jumlah LHE yang dihasilkan	420	84	84	84	100	40	84	84	100
4	05	15	003	Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah LHR yang dihasilkan	505	101	101	101	100	40	101	101	100
4	05	15	004	Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov/BPK/K/L	420	84	84	84	100	40	84	84	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	15	005	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah I	104	0	0	0	0	26	26	100	
					Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah II	104	0	0	0	0	26	26	100	
					Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah III	104	0	0	0	0	26	26	20	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan	189	30	15	15	100	23,81	36	36	100
4	05	15	006	Pengawasan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya yang dihasilkan di wilayah I	15	0	3	3	100	20	3	3	100
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya yang dihasilkan di wilayah II	15	0	3	3	100	20	3	3	100
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	15	0	3	3	100	20	3	3	100





Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	22	001	Pemetaan Risiko	Jumlah dokumen peta risiko PD	48	48	48	48	100	100	48	48	100
4	05	22	002	Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah dokumen pemetaan Kegiatan Saber Pungli	35	35	35	35	100	100	35	35	100
4	05	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah										
4	05	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD	3	3	3	3	100	100	3	3	100



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Perangkat Daerah										
4	05	22	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	22	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	006	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan dan Minuman Rapat	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	22	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	22	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	22	012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang direhab	1	1	1	1	100	100	1	1	100
4	05	22	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	7	0	0	0	0	0	4	4	100
4	05	22	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	450	0	0	0	0	0	0	0	0
4	05	22	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ BinteK/Seminar	1250	0	250	250	100	20	250	250	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	05	22	016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	1	1	1	1	100	100	1	1	100
4	05	22	023	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan	12	12	12	12	100	100	12	12	100
4	05	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4	05	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	4	4	4	4	100	100	4	4	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018-2023 (%)	Target Prog.& Keg. Renja Thn 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2021	
								Target Renja Itprov Thn 2021	Realisasi Renja Itprov Thn 2021	Tk. Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2021	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Perencanaan PD	PD yang disusun									
4	05	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	6	6	6	6	100	100	6	6	100

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat diketahui dari Tabel berikut.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/St andar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2021	2021	2022	2019	2021	2021	2022	
1	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	-		Level 3 DC (2 elemen)	Level 3 Dc (1 elemen)	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	
2	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	-		3,1	3,2	3,3	3,4	3,158	3,2	3,3	3,4	
3	Nilai Kepuasan Masyarakat	-		87,3	87,3	87,3	87,3	88,69	88,69	87,3	87,3	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		84	85	86	87	83,55	85	86	87	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah.



**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi**  
**Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

<b>Tupoksi PD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
<p>Tugas: Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;</li> <li>4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan</li> <li>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;</li> <li>2. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal pada lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;</li> <li>2. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal</li> <li>3. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik</li> </ol> <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan</li> <li>2. Sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> dalam mencapai target yang ditetapkan</li> </ol>

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi keempat, yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”, dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Sementara untuk Program Kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah:

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK

- a. Inspektorat sebagai fasilitator masuknya kurikulum yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada jenjang Pendidikan SMA/SMK
  - b. Inspektorat melaksanakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Inspektorat Goes To School dan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar melalui *Saber Goes To School* pada SMA/SMK se-Jawa Tengah sebagai pondasi awal Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Anti Pungli.
2. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

Inspektorat sebagai aparat pengawas berkontribusi terhadap program penanggulangan kemiskinan di Desa Turirejo Kabupaten Demak melalui Gerakan 1 OPD 1 Desa Dampungan.

Adapun dampak yang timbul terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional, seperti SDGs yang tertuang pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, khususnya Tujuan 16, yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan; Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua; Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan. Terkait dengan hal tersebut, perilaku anti korupsi sangat ditekankan untuk dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perilaku anti korupsi dimulai dari lingkungan yang paling mendasar dan dimulai sejak dini yaitu melalui sekolah-sekolah SMA/SMK se-Jawa Tengah.

Saat ini terdapat isu strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur:

- penguatan fungsi inspektorat Daerah;
- penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah;

- pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah;
- penambahan inspektur pembantu;
- peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu;
- mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Terkait adanya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Maka selanjutnya penetapan tujuan dan sasaran nantinya harus mengacu pada misi dan program kerja yang sesuai.

Tabel 2.4  
Tabel Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Sistem/ Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015</li> <li>2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan)</li> <li>3. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP;</li> <li>2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan.</li> </ol>
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik</li> <li>2. Adanya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah</li> <li>3. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dengan stakeholder terkait</li> </ol>	<p>Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.</p>
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor sangat tinggi</li> <li>2. Memiliki AP/IP bersertifikat nasional/internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD)</li> <li>2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.</li> </ol>

Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Sumber Daya Anggaran	Anggaran yang terus meningkat menandakan komitmen dan keseriusan Kepala Daerah dalam penguatan pengawasan	Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk prasarana pemeriksaan
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Kepala Daerah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan peran Inspektorat</li> <li>2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan</li> </ol>	Kurangnya komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait (LSM, Akademisi, masyarakat)

Tabel 2.5  
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
Sistem/kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</li> <li>2. Terbitnya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 membuka peluang penguatan peran Inspektorat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya;</li> <li>2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan</li> <li>3. Isu eselonering sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan SOTK Inspektorat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan SDM baik</li> </ol>

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
		dari sisi kuantitas maupun kualitas
Kelembagaan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas</li> <li>2. Inspektorat memiliki banyak “atasan” di tingkat pusat</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan karir dan kompetensi terbuka luas	Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi (Badan Kepegawaian Daerah)
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Dukungan KPK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> <li>3. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah</li> <li>2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai penjamin mutu</li> <li>4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Provinsi/</li> </ol>

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
		Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum 5. Semakin bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum

#### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Jawa Tengah 2018-2023.



Tabel 2.4  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jawa Tengah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100%	15.419.290	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jawa Tengah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100%	12.304.605	
			Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	100%				Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	100%		
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	100%				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	100%		
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jawa Tengah	Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan	30 laporan	3.693.788	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jawa Tengah	Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan	30 laporan	3.418.020	Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
											pemeriksaan SKPD
		Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/ Kementerian/ Lembaga	84 laporan	1.895.742		Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/ Kementerian/ Lembaga	84 laporan	1.261.345	Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD
		Jawa Tengah	Jumlah LHE yang dihasilkan	84 laporan	3.012.155		Jawa Tengah	Jumlah LHE yang dihasilkan	84 laporan	1.835.760	Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD
		Jawa Tengah	Jumlah LHR yang dihasilkan	101 laporan	1.077.986		Jawa Tengah	Jumlah LHR yang dihasilkan	101 laporan	893.220	Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jawa Tengah	Jumlah LHADTT yang dihasilkan	114 laporan	4.188.004	Audit dengan tujuan tertentu	Jawa Tengah	Jumlah LHADTT yang dihasilkan	114 laporan	4.319.480	Adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bersama Inspektorat Kab/Kota
		Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan	12 laporan	1.551.655	Pengawasan lainnya	Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan	12 laporan	576.780	Pelaksanaan beberapa kegiatan dilaksanakan melalui <i>video conference</i>
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jawa Tengah dan Jakarta	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	87,35	5.880.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jawa Tengah dan Jakarta	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	87,35	5.854.569	
	Nilai Budaya Integritas	83%		Nilai Budaya Integritas			83%				
	Persentase APIP berlisensi	60%		Persentase APIP berlisensi			60%				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
			nasional/internasional					nasional/internasional			
			Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	100%				Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	100%		
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko	1 Dokumen	1.365.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko	1 Dokumen	1.351.544	Beberapa kegiatan dilakukan melalui <i>video conference</i>
b	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional	2 orang	367.500	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional	2 orang	480.000	Adanya peningkatan jumlah APIP yang mengikuti diklat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
			Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli	35 dokumen	945.000			Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli	35 dokumen	862.715	Pengurangan jumlah peserta sosialisasi dan perlengkapan Rakor Saber Pungli
			Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 laporan	2.310.000			Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 laporan	2.371.240	Penambahan Survey Penilaian Integritas yang dialihkan dari Kegiatan Surveillance ISO
			Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah	48 dokumen	630.000			Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah	48 dokumen	592.580	Pelaksanaan FGD SPIP melalui Video Conference
			Jumlah Dokumen Surveillance ISO	1 dokumen	262.500			Jumlah Dokumen Surveillance ISO	1 dokumen	196.490	Pengalihan Survey Penilaian Integritas pada kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersama pemangku kepentingan. Forum Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021 dan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jawa Tengah	Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	12 Laporan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan tidak melakukan perannya sebagai <i>watchdog</i> , akan tetapi sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i> → DPRD
		Jawa Tengah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	114 laporan	Pada TA 2021 diharapkan Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah lebih Fokus kepada Pengelolaan Aset → DPRD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melaksanakan Audit dana BOS pada SMA / SMK Swasta di Jawa Tengah → Ombudsman Jateng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli	35 dokumen	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Perlu melakukan sosialisasi untuk Penanganan Aduan, juga melakukan sosialisasi terkait Tupoksi Inspektorat ke masyarakat → Ombudsman



### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 1.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 tersebut, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartaba, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan dan visi misi Presiden maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu:

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Presiden melalui misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” yang dijabarkan dengan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Inspektorat juga dapat berperan dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan lima arahan Presiden untuk mencapai Visi Indonesia 2045 “Indonesia Maju”.

Implementasi misi ke-delapan dengan agenda prioritas pembangunan nasional ke-tujuh dan arahan Presiden ke-empat tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 ke-lima, yaitu: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada:

1. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan Perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN
2. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan

## 1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah: “Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola

2. Meningkatnya Skor pada 3 (Tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Level Kapabilitas APIP	Nilai	3
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.19
		Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level pada tiga elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	3
		Meningkatnya Skor pada 3 (Tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3.19
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.3
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemer													9,084,663,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ntahan yang baik															
	Level Kapabilitas APIP										Level	3			
	Nilai Maturitas SPIP										Nilai	3.19			
		Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional,												6,396,969,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		dan Struktur Tata Kelola													
			Level pada tiga elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan ; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen								Level	3	6,396,969,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Struktur Tata Kelola.												
				6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								6,396,969,000		
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah					%	85	1,524,400,000		INSPEKTORAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.02.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal						792,000,000	
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan			Laporan	54	792,000,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
				6.01.02.1.01.04					Reviu Laporan Keuangan				792,000,000	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	54	792,000,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
				6.01.02.1.02			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						732,400,000	
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas			Laporan	12	732,400,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan						KEUANGAN DAERAH
				6.01.02.1.02.02					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				732,400,000	
										Jumlah Laporan Hasil Audit Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	10	732,400,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Monitoring Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	2	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus					%	85	1,329,300,000	INSPEKTOR AT
				6.01.02.1.02			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan						1,329,300,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Tujuan Tertentu								
								Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan			Laporan	24	1,329,300,000		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
				6.01.02.1.02.02					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1,329,300,000		
										Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	24	1,329,300,000		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										yang dihasilkan				
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah					%	85	1,470,914,000	INSPEKTORAT
				6.01.02.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,470,914,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan			Laporan	22	1,470,914,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
				6.01.02.1.01.01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1,470,914,000	
										Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	22	1,470,914,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					%	85	1,451,870,000	INSPEKTORAT
				6.01.02.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,451,870,000	
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan			Laporan	79	1,451,870,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan							PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
				6.01.02.1.01.01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				450,000,000		
										Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	47	450,000,000		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	0		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
				6.01.02.1.01.03					Reviu Laporan Kinerja				46,250,000	
										Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	25	46,250,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AHAN DAERAH
				6.01.02.1.01.05					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				955,620,000	
										Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis di Kab/Kota yang dihasilkan	Laporan	8	955,620,000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
						Persentase Penyelesaian					%	85	620,485,000	SEKRETARIAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						aian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan								
				6.01.02.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal						620,485,000	
								Jumlah Dokumen IHPS			Dokumen	2	620,485,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI
				6.01.02.1.01.07					Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIEvaluasi RI danTindak				620,485,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
									TindakLanjut LanjutHasil Hasil						
										Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaa n	Lapo ran	85	620,485,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		<b>Meningkatnya Skor pada 3 (Tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP</b>											<b>2,687,694,000</b>		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi								Nilai	3.19	2,687,694,000	INSPEKTOR AT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			5.Pemantauan dan Pengendalian Intern												
				6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								2,687,694,000		
						Nilai Self Assessment RB Provinsi					Nilai	86	313,580,000		SEKRETARIAT
				6.01.03.1.02			Pendampingan						313,580,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							dan Asistensi								
								Jumlah OPD yang dievaluasi RB			OPD	41	313,580,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
				6.01.03.1.02.02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				313,580,000		
										Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD	41	313,580,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
						Nilai Self Assessment RB Provinsi					Nilai	0	-	INSPEKTORAT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						-	
								Jumlah OPD yang dievaluasi RB			OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
				6.01.03.1.02.02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				-	
										Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														REFORMASI BIROKRASI
						Persentase Capaian Aksi Stranas PK					%	0	-	INSPEKTORAT
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						-	
								Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli			Laporan	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.03.1.02.04					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				-	
										Jumlah Dokumen pemetaan kegiatan saber pungli	Dokumen	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
						Persentase Capaian Aksi Stranas PK					%	90	390,060,000	SEKRETARIAT
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						390,060,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi			Laporan	4	67,280,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI
				6.01.03. 1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				67,280,000	
										Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	4	67,280,000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI
								Jumlah Laporan Tahunan			Laporan	1	322,780,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Saber Pungli						DAN KEUANGAN
				6.01.03.1.02.04					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				322,780,000	
										Jumlah Dokumen pemetaan kegiatan saber pungli	Dokumen	1	322,780,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
						Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan					%	100	826,388,000	SEKRETARIAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						dan asistensi								
				6.01.03.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						563,764,000	
								Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan			Laporan	1	563,764,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								Fasilitasi Pengawasan							
				6.01.03.1.01.02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				563,764,000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko	Dokumen	4	563,764,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						262,624,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Jumlah Dokumen Surveilance ISO			Dokumen	1	142,624,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
				6.01.03.1.02.01					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				142,624,000	
										Jumlah Dokumen Surveillance ISO	Dokumen	1	142,624,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
								Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan			Laporan	1	120,000,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.03. 1.02.02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				120,000,000	
										Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional	Orang	2	120,000,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
						Persentase Nilai MCP korsupgah					%	85	734,026,000	SEKRETARIAT
				6.01.03. 1.02			Pendampingan dan Asistensi						734,026,000	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase Pelaporan LHKASN			%	100	457,394,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				6.01.03. 1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				457,394,000	
										Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKASN	OPD	41	457,394,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
								Persentase			%	100	276,632,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								Pelaporan LHKPN							ASI UMUM DAN KEUANGAN
				6.01.03.1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				276,632,000		
										Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKPN	OPD	41	276,632,000		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
						Persentase Nilai MCP korszupgah					%	0	-		INSPEKTORAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						-	
								Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi			Laporan	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
				6.01.03.1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				-	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
								Persentase Pelaporan LHKASN			%	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
				6.01.03. 1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan				-	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
									Pemberantasan Korupsi						
										Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKASN	OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
								Persentase Pelaporan LHKPN			%	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.01.03. 1.02.03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				-	
										Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKPN	OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
						Persentase Penerapan MR di OPD					%	0	-	INSPEKTORAT
				6.01.03. 1.02			Pendampingan						-	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							dan Asistensi								
								Jumlah Pendampingan MR ke OPD			OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
				6.01.03.1.02.02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				-		
										Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	0	-	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMAS	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														I BIROKRASI
						Persentase Penerapan MR di OPD					%	100	423,640,000	SEKRETARIAT
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						423,640,000	
								Jumlah Pendampingan MR ke OPD			OPD	5	423,640,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
				6.01.03.1.02.02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				423,640,000	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	5	423,640,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
<b>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</b>													<b>28,249,793,000</b>	<b>INSPEKTOR AT</b>
	Nilai Kepuasan Masyarakat										Nilai	87.35		INSPEKTOR AT
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b>											<b>105,000,000</b>	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Perangkat Daerah													
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah								Nilai	88	105,000,000	INSPEKTORAT	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								105,000,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi					%	100	105,000,000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						kinerja OPD								
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105,000,000	
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			Dokumen	11	105,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan				60,000,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Perangkat Daerah					
										Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	5	60,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,000,000	
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	45,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN
		<b>Meningkatnya kualitas pelayanan</b>											<b>28,144,793,000</b>	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		perangkat daerah													
			Nilai Kepuasan Masyarakat								Nilai	87.35	28,144,793,000	INSPEKTORAT	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								28,144,793,000		
						Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan					%	100	28,144,793,000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Perangkat Daerah									
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21,185,372,000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			Laporan	1	21,185,372,000		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21,185,372,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	Bulan	14	21,185,372,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						183,700,000	
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah			Laporan	1	183,700,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								pada Perangkat Daerah							
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				183,700,000		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	183,700,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						464,307,000		
								Jumlah laporan pelaksan			Laporan	3	464,307,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								aan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							ASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		
										Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	150	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.05.03					Pendataan dan Pengolahan				116,700,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
									Administrasi Kepegawaian						
										Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	116,700,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				347,607,000		
										Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	250	347,607,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						606,837,000	
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Laporan	4	606,837,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5,000,000	
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan	Bulan	12	5,000,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah				DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				184,755,000	
										Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	184,755,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				367,082,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Konsultasi SKPD					
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	367,082,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50,000,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	1	50,000,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,165,728,000	
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Laporan	2	2,165,728,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
								Pemerintah Daerah							
				X.XX.01.1.07.02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		
										Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Unit	4	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,165,728,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	195	2,165,728,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,752,635,000	
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	4	2,752,635,000	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				214,909,000	
										Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	Bulan	12	214,909,000	
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				784,900,000	
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi,	Bulan	12	784,900,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										air, dan listrik perangkat daerah				
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30,000,000	
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	30,000,000	
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,722,826,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	1,722,826,000	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						786,214,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	3	786,214,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300,530,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	300,530,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				316,994,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
												2023		
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	316,994,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				168,690,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2023			
												Target (13)	Rp (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
									Bangunan Lainnya						
										Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	168,690,000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renja ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penguatan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar penguatan pengawasan dan perubahan peran Inspektorat menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dapat terlaksana secara optimal.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.



Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu yang terangkum dalam Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2018 – 2023, khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Semarang, Agustus 2022

INSPEKTUR PROVINSI  
JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611226 198303 1 001